

Judul : Status tanggap darurat, Senayan minta warga Papua jadi prioritas utama
Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Status Tanggap Darurat Senayan Minta Warga Papua Jadi Prioritas Utama

FOTO: DPR/GO



Indrajaya

STATUS tanggap darurat selama 14 hari di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mendapat perhatian serius dari kalangan Senayan. Status ini ditetapkan mulai Jumat (17/4/2026), sebagai respons atas konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI di wilayah tersebut.

Anggota Komisi II DPR Indra Jaya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga yang terdampak konflik. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan.

Dia berharap, tidak ada lagi korban dari kalangan warga sipil dalam konflik yang terjadi. "Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif," ujar Indra Jaya dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Indrajaya memuji gerak cepat yang dilakukan Pemkab Puncak dalam menetapkan status tanggap darurat sebagai upaya melindungi masyarakat. Namun, peran aparat keamanan dalam menindak tegas KKB juga penting dilakukan agar tidak terjadi lagi aksi kekerasan

dan penyerangan terhadap masyarakat sipil.

"Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan konflik di wilayah tersebut," tegas politikus PKB ini.

Sementara, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendorong pembentukan tim investigasi untuk memeriksa fakta yang terjadi saat baku tembak antara TNI dan KKB di Puncak, Papua Tengah. "Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi."

"Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak menjokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas," ujar Hasanuddin, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, hingga saat ini, ada berbagai versi tentang peristiwa baku tembak tersebut. Beberapa versi di antaranya berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat terutama bagaimana Pemerintah menjamin keamanan di wilayah Papua.

Karena itu, Pemerintah bisa membentuk tim investigasi yang melibatkan Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda) dan unsur gabungan penegak hukum. Karena penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. "Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan," tegas politikus PDIP ini.

Komisi I DPR, kata Hasanuddin, akan segera meminta keterangan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemendagri), dan Komnas HAM. Agar, proses penanganan kasus ini berjalan dengan profesional, transparan dan berkeadilan. ■ TIF